PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Oleh :

Risna Dewi, S.Sos., MSP

Zulham, BA., MA

M. Akmal, S.Sos., MA

T. Alfiady, S.Sos., MSP

Abstrak

Pembangunan pada dasarnya adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan dan memiliki konsep yang bermakna. Pemberdayaan merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, social, dan transformasi budaya. Proses ini pada akhirnya, akan dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada rakyat. Dalam hal ini cara terbaik untuk mengatasi masalah pembangunan adalah membiarkan semangat wiraswasta tumbuh dalam kehidupan masyarakat berani mengambil resiko, berani bersaing menumbuhkan semangat untuk bersaing, dan menemukan hal-hal baru (inovasi). Proses pembangunan masyarakat juga dimaksudkan sebagai upaya mencari jawaban terhadap terjadinya berbagai perubahan pada hampir semua bagian masyarakat dunia ketiga, seperti Indonesia. Permasalahan pertambahan penduduk yang semakin meningkat, industrialisasi yang semakin pesat, pemanfaatan teknologi yang tinggi untuk segala aktivitas ekonomi, pembagian kerja dan kelas social yang semakin heterogen, semakin banyaknya tenaga kerja asing, pengaruh globalisasi dari Negara-negara maju, system informasi yang menembus ruang dan waktu (borderless) akan mengubah wajah Indonesia masa depan.

Kata kunci : Pembangunan, Pemberdayaan

A. Pendahuluan

Pembangunan yang dicita-citakan adalah pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Keadilan yang menuju pada kemakmuran, tetapi belum tentu sebaliknya. Yang utama adalah pembangunan masyarakat (manusia), sedangkan pembangunan fisik hanyalah pertanda bahwa sebagian manusianya makmur. Hakikat pembangunan adalah membangun masyarakat bangsa secara menyeluruh, demi mencapai kesejahteraan rakyat. Untuk bisa membangun lebih baik, masyarakat harus berpendidikan dan bermoral lebih baik. Persepsi yang lebih mendekati kebenaran ialah bahwa istilah "pembangunan" harus di pahami dalam konteks yang luas. Alasan untuk mengatakan bahwa pembangunan harus mencakup segala segi kehidupan dan penghidupan bangsa dan Negara yang bersangkutan meskipun dengan skala prioritas yang berbeda dari satu Negara dengan Negara lain.

Semua agenda pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal dan membawa perubahan yang lebih baik. Namun konsekuensi dari pembangunan itu sendiri dapat menimbulkan dampak-dampak yang akan dialami setelah pembangunan, baik secara positif dan negatif. Dampak tersebut bisa saja terjadi pada perubahan nilai-nilai sosial, perubahan ekonomi, perubahan norma-norma sosial, pola perilaku masyarakat, perubahan lingkungan dan sebagainya. Pembangunan dalam suatu daerah dilaksanakan secara terencana, terpadu, bertahap dan berlanjut, serta merupakan pembangunan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat sebagai pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kemakmuran masyarakat secara merata.

Mendirikan pemerintahan dengan harapan adanya keadilan di samping dipengaruhinya kebutuhan masyarakat. Keadilan adalah bukti cinta pemerintah kepada rakyat, sehingga rakyat akan mencintai pemerintah dan akan berpartisipasi dalam pembangunan secara maksimal. Keadilanlah yang menyebabkan persatuan dalam menuju kemakmuran yang hakiki (*Sustainable*). Tugas pemerintah disamping menyelenggarakan perekonomian dan pasar yang adil, mengelola kebutuhan publik serta melaksanakan pemerataan (keadilan social), dan desentralisasi yang adil, birokrasi yang efisien dan birokrat yang jujur dan efisien, (afifuddin, 2012 : 50).

B. Pengertian Pembangunan

Pembangunan merupakan perubahan kearah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Dalam kata pembangunan, hal yang pokok adalah hakikat membangun, yang berlawanan dengan merusak oleh karena itu perubahan keadaan kearah yang lebih baik seperti yang diinginkan dengan upaya yang terencana, harus dilakukan dengan jalan yang tidak merusak, tetapi justru mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada, Kartasmita (2001: 9)

Pembangunan diharapkan selalu dapat menjawab keinginan masyarakat. Cakupan pembangunan adalah seluruh segi penghidupan masyarakat, serta tidak menimbulkan dampak-dampak yang buruk setelahnya. Pengertian pembangunan harus dilihat secara dinamis, bukan dilihat sebagai konsep statis yang selama ini sering kita anggap sebagai suatu kesalahan yang wajar. Pembangunan pada dasarnya adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha

Development is not a static concept. It is continuously changing, dan juga bisa dikatakan bahwa pembangunan itu sebagai "ending goals". Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka, Nawawi (2009:5)

Setiap pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah haruslah mendapat dukungan dan partisipasi dari masyarakat, karena pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dimaksudkan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat.

Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan Pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (*National Building*), Siagian (2005:4)

Adapun beberapa arti pembangunan secara popular, yaitu:

1. *Capacity*, hal ini menyangkut aspek kemampuan meningkatkan *income* atau produktivitas.
2. *Equity*, hal ini menyangkut aspek pengurangan kesenjangan antara berbagai lapisan masyarakat dan daerah.
3. *Empowerment*, hal ini menyangkut pemberdayaan masyarakat agar dapat menjadi aktif dalam memperjuangkan nasibnya dan sesamanya.
4. *Sustainable*, merupakan hal yang menyangkut usaha untuk menjaga kelestarian pembangunan, Arifin (2008:41)

Gambar 1.1
Pengertian pembangunan

Sumber : Afifuddin, 2012 : 48

Pembangunan adalah perubahan yaitu mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang. Pembangunan adalah pertumbuhan yaitu kemampuan suatu Negara untuk terus selalu berkembang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan, berarti bahwa baik secara konseptual maupun secara operasional, tujuan dan berbagai kegiatan dengan sengaja ditentukan dalam seluruh potensi dan kekuatan nasaional.

C. Tujuan Pembangunan

Tujuan pembangunan di Negara manapun tentunya untuk kebaikan masyarakatnya dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. pada umumnya komponen yang dicita-citakan dalam keberhasilan pembangunan adalah bersifat relatif dan sukar membayangkan tercapainya "titik jenuh yang absolut", dan yang sudah tercapai tidak mungkin ditingkatkan lagi, seperti: keadilan sosial, kemakmuran yang merata, perlakuan yang sama di mata hukum, kesejahteraan material, mental dan spiritual, kebahagiaan untuk semua, ketentraman, serta keamanan. Untuk mencapai tujuan ini, maka masyarakat harus lebih berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan yang meliputi keterlibatan aktif, keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab, serta keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat, Nawawi (2009:9).

Secara garis besar, yang menjadi tujuan umum (*goals*) pembangunan adalah proyeksi terjauh dari harapan-harapan dan ide-ide manusia, komponen-

komponen dari yang terbaik yang mungkin, atau masyarakat ideal yang terbaik yang dapat dibayangkan. Tujuan khusus (*objectives*) pembangunan adalah tujuan jangka pendek, biasanya yang dipilih sebagai tingkat pencapaian sasaran dari suatu program tertentu. Sedangkan target pembangunan adalah tujuan-tujuan yang dirumuskan secara konkret, dipertimbangkan rasional dan dapat direalisasikan sebatas teknologi dan sumber-sumber yang tersedia, yang ditegakkan sebagai aspirasi suatu situasi yang ada dengan tujuan akhir pembangunan, Nasution (2004: 28).

D. Mengukur Keberhasilan Pembangunan

Ada beberapa poin yang bisa dilakukan dalam mengukur berhasil atau tidaknya suatu pembangunan, yaitu:

1. Kekayaan rata-rata

Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau pendapatan Negara tersebut setiap tahunnya.

2. Pemerataan

Yaitu kekayaan keseluruhan yang dimiliki atau yang diproduksi oleh sebuah bangsa dapat merata dan tidak adanya kesenjangan ekonomi.

3. Kualitas kehidupan

Semakin majunya perkembangan pembangunan diharapkan kualitas dari kehidupan masyarakatpun semakin meningkat. Kehidupan masyarakat dapat mengikuti dengan perkembangan zaman dan tidak adanya kesenjangan yang mencolok dalam kehidupan masyarakat.

4. Kerusakan lingkungan

Pada sebuah Negara yang tinggi produktivitasnya dan merata pendapatan penduduknya, bisa saja berada dalam sebuah proses untuk menjadi semakin miskin. Hal ini disebabkan karena pembangunan yang menghasilkan produktivitas yang tinggi itu tidak memperdulikan dampak terhadap lingkungannya. Lingkungan semakin rusak, sumber-sumber alamnya semakin terkuras, sementara kecepatan bagi alam melakukan rehabilitasi lebih lambat daripada kecepatan manusia dalam mengolah sumber daya alam tersebut.

5. Keadilan sosial dan kesinambungan.

Faktor keadilan sosial (pemerataan pendapatan) dan faktor lingkungan yang berupaya untuk selalu melestarikan pembangunan supaya bisa berlangsung terus menerus dan berkesinambungan, Otto (2004:22)

E. Faktor Penghambat Pembangunan

Pembangunan merupakan proses perubahan secara sengaja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan banyak

dipengaruhi oleh kondisi fisik dan nonfisik dari suatu masyarakat, sehingga akselerasi (percepatan) pembangunan disetiap negara tidak sama. Salah satu indikator yang menentukan kriteria kelas masyarakat dapat dilihat dari tingkat pembangunan yang dicapai. Menurut Tjokromijojo dalam Nawawi (2009: 1), faktor yang mempengaruhi pembangunan dan mempunyai relevansi dengan kondisi masyarakat antara lain adalah:

1. Masyarakat yang masih tradisional
2. Masyarakat yang bersifat peralihan
3. Masyarakat maju (modern)

Menurut Damanhuri (2010: 79), berdasarkan problema empiris ekonomi politik dan pembangunan di Negara-negara sedang berkembang, faktor-faktor yang menjadi tantangan, masalah dan hambatan dalam menjalankan agenda pembangunan adalah:

1. Globalisasi
2. Kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan
3. Industrialisasi, pertanian, dan informalisasi ekonomi
4. Korupsi
5. Utang luar negeri
6. Lingkungan (ekologi)
7. Birokrasi.

F. **(Empowerment) Masyarakat**

Secara Konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah, dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan dan memiliki konsep yang bermakna. Kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal :

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan tidak statis, melainkan dinamis, (Suharto, 2009:58)

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya, (b) menjangkau sumber-sumber produksi

yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan, dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan :

1. Kekuasaan bertujuan meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung
2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (parsons et,al dalam Suharto, 2009:9)
3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas kehidupannya)

Di sisi lain Paul (1987) dalam Priyono dan Pranarka (1996) mengatakan bahwa pemberdayaan berarti "pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan pada kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap "proses dan hasil-hasil pembangunan."

Sedangkan konsep pemberdayaan menurut Friedman (1992) dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaransosial melalui pengamatan langsung. Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan memilikidua kecenderungan, antara lain : *pertama*, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya.

Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan *kedua*, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Dua kecenderungan tersebut memberikan (pada titik ekstrem) seolah berseberangan, namun

seringkali untuk mewujudkan kecenderungan primer harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu (Sumodiningrat, Gunawan, 2002).

Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, et al., dalam Suharto, 1999:58).

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people centred, participatory, empowering, and sustainable*" (Chambers, 1995). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedman (1992) disebut sebagai *alternative development*, yang menghendaki "*inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity*", (Kartasasmita, 1997).

Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan: penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan. Tahap pertama adalah penyadaran. Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi "pencerahan" dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk memiliki "sesuatu". Program-program yang dapat dilakukan pada tahap ini misalnya memberikan pengetahuan yang bersifat kognisi, belief, dan healing. Prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu diberdayakan dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka sendiri. Setelah menyadari, tahap kedua adalah pengkapasitasan. Inilah yang sering disebut *capacity building* atau dalam bahasa sederhana memampukan atau *enabling*. Untuk diberi daya atau kuasa, yang bersangkutan harus memiliki kemampuan.

G. Pemberdayaan dan Partisipasi

Pemberdayaan dan partisipasi merupakan hal yang menjadi perhatian dalam proses pembangunan belakangan ini di berbagai Negara. Kemiskinan yang terus melanda dan menggerus kehidupan umat manusia akibat resesi internasional yang terus bergulir dan proses restrukturisasi, agen-agen nasional-internasional, serta Negara-negara setempat menunjukkan perhatian yang

sangat besar terhadap strategi partisipasi masyarakat sebagai sarana percepatan proses pembangunan. Karena itu perlu ditekankan peningkatan tentang pentingnya pendekatan alternative berupa pendekatan pembangunan yang diawali oleh proses pemberdayaan masyarakat local (Craig dan Mayo, 1995 dalam Hikmat, 2010:4).

Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, social, dan transformasi budaya. Proses ini pada akhirnya, akan dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada rakyat. Dalam hal ini cara terbaik untuk mengatasi masalah pembangunan adalah membiarkan semangat wiraswasta tumbuh dalam kehidupan masyarakat berani mengambil resiko, berani bersaing menumbuhkan semangat untuk bersaing, dan menemukan hal-hal baru (inovasi) melalui partisipasi masyarakat, (Hikmat, 2010 : 4).

H. Strategi pembangunan Masyarakat pada Masa Mendatang

Pembangunan masyarakat dipandang sangat penting berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut :

1. Masyarakat yang sehat merupakan produk dari masyarakat yang aktif
2. Proses perencanaan yang berasal dan diinginkan oleh masyarakat adalah lebih baik dibandingkan dengan perencanaan yang berasal dari penguasa.
3. Proses partisipasi dalam pembangunan masyarakat merupakan pencegahan berbagai sikap masa bodoh dari individu-individu dalam masyarakat.
4. Proses pemberdayaan yang kuat dalam upaya-upaya kemasyarakatan merupakan dasar kekuatan bagi masyarakat yang demokrasi.

Pada sisi lain, proses pembangunan masyarakat juga dimaksudkan sebagai upaya mencari jawaban terhadap terjadinya berbagai perubahan pada hampir semua bagian masyarakat dunia ketiga, seperti Indonesia. Permasalahan pertambahan penduduk yang semakin meningkat, industrialisasi yang semakin pesat, pemanfaatan teknologi yang tinggi untuk segala aktivitas ekonomi, pembagian kerja dan kelas social yang semakin heterogen, semakin banyaknya tenaga kerja asing, pengaruh globalisasi dari Negara-negara maju, system informasi yang menembus ruang dan waktu (*borderless*) akan mengubah wajah Indonesia masa depan, (Hikmat, 2010 : 81).

Maka pemecahan masalah secara tradisonal dan pemberdayaan adalah berikut gambar 1.3

Sumber, Dubois dan miley, 1996, dalam Hikmat, 2010 : 45

Proses pemecahan masalah berbasis pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan prinsip bekerja bersama masyarakat menyadari bahwa masyarakat mempunyai hak-hak yang harus dihargai. Manusia perlu diberi kesempatan dan peluang untuk mengaktualisasikan eksistensinya, karena aktualisasi diri merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat dipungkiri.

J. Penutup

Agenda pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal dan membawa perubahan yang lebih baik. Namun konsekuensi dari pembangunan itu sendiri dapat menimbulkan dampak-dampak yang akan dialami setelah pembangunan, baik secara positif

dan negatif. Dampak tersebut bisa saja terjadi pada perubahan nilai-nilai sosial, perubahan ekonomi, perubahan norma-norma sosial, pola perilaku masyarakat, perubahan lingkungan dan sebagainya. Pembangunan dalam suatu daerah dilaksanakan secara terencana, terpadu, bertahap dan berlanjut, serta merupakan pembangunan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat sebagai pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kemakmuran masyarakat secara merata.

Perubahan yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat yang kurang beruntung sehingga mendapatkan kuasa dan menjadi mandiri, sehingga mampu memperbaiki kualitas hidup segenap masyarakat. Tujuan objektif adalah memberantas kemiskinan absolute, dan mampu untuk realisasi keadilan yang distributive dan peningkatan partisipasi masyarakat secara nyata.

Kepustakaan

- Afifuddin, 2012, *Pengantar Administrasi Pembangunan, Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi*, Bandung, Penerbit Alfabeta.
- Arifin, Nasution, 2008, *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Sumatera Utara: FISIP USU Press
- Hikmat, Harry, 2010, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung, Humaniora Utama Press.
- Kartasasmita, Ginandjar 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat-Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Penerbit PT. Pustaka CIDESINDO, Jakarta.
- Kartasasmita, Ginandjar, 2001, *Administrasi Pembangunan: Pemikiran dan praktiknya di Indonesia*, Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia.
- Nawawi, Ismail, 2009, *Pembangunan dan Problema Masyarakat: Kajian, Konsep, Model, Teori, dari aspek Ekonomi dan sosiologi*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Nasution, Zulkarimen, 2004, *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Prijono, dan Pranarka, 1996, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Penerbit Centre for Strategic and International Studies, Jakarta.
- Siagian, sondang P, 2005, *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan strateginya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Soemarwoto, Otto, 2004, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, DJAMBATAN: Jakarta
- Sumodiningrat, Gunawan, 1999, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial Jakarta: Gramedia*.
- Suharto Edi, 2009, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Refika Adiyatama.

OOOOO